

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN
KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENINGKATKAN
MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**WIWIN
NPM : 177310227**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wiwin
 NPM : 177310227
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif..

Pekanbaru, Desember 2021

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wiwin
NPM : 177310227
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten
Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan
Membaca Masyarakat

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

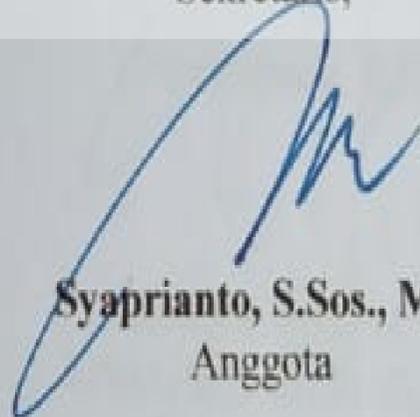
Pekanbaru, 02 Maret 2022

Ketua,

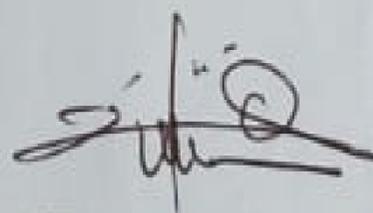
Sekretaris,



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

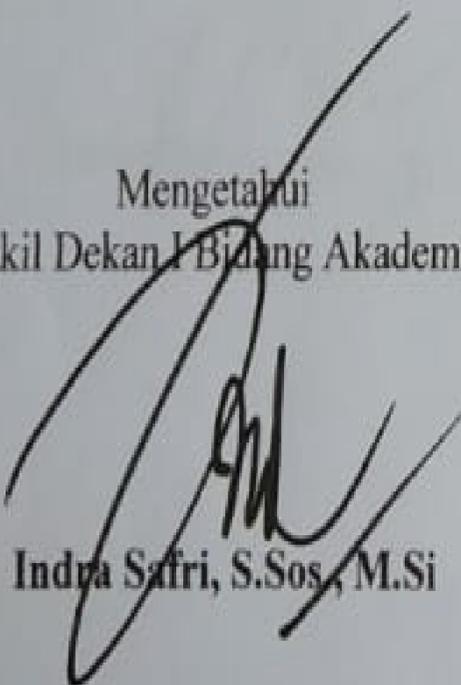


Syaprianto, S.Sos., M.IP
Anggota



Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

: Wiwin

: 177310227

: Ilmu Pemerintahan

: Strata Satu (S-1)

: Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten
Pekalongan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan
Membaca Masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama

NPM

Program Studi

Jenjang Pendidikan

Judul Skripsi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

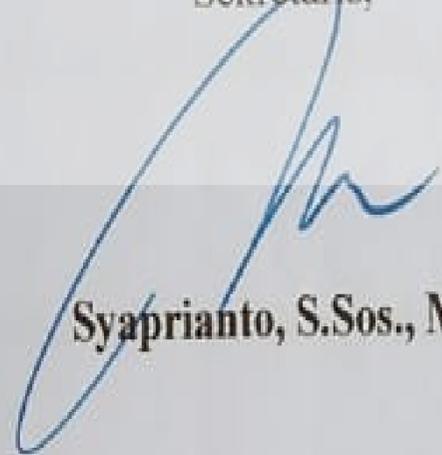
An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,

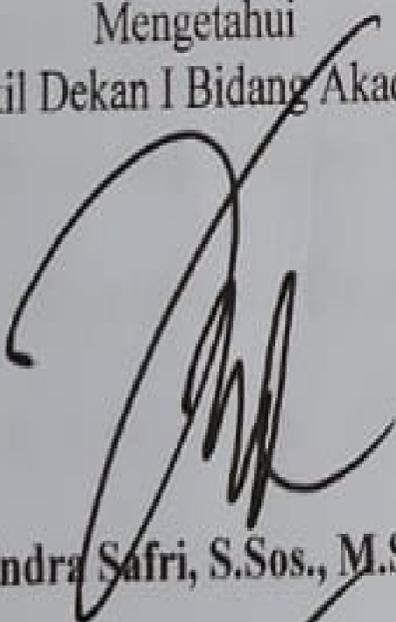


Septa Juliana, S.Sos., M.Si



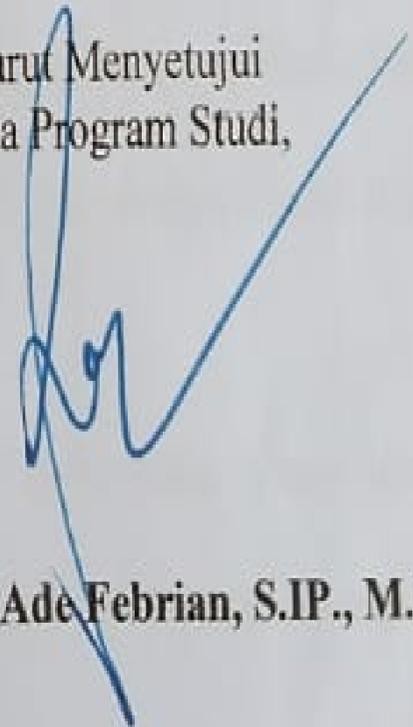
Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: /UIR-Fs/Kpts/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing

2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019

7. SK Rektor No 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR

8. SK Rektor No 258/UIR/Kpts/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024

Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa

MEMUTUSKAN

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini

Nama	Septa Juliana, S.Sos, M.Si
NIP/NPK	1029098302
Pangkat/ Jabatan	III/b - Penata Muda TK 1
Kedudukan	Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini

Nama	Wiwin
NPM	177310227
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	Peran Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Masyarakat

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing

3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR,

4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 27 Desember 2021 s/d 27 Juni 2022, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada

1. Yth Bapak Rektor UIR
2. Yth Ketua Prodi IP
3. Yth Ka Labor IP
4. Arsip - SK Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
Bapak.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pegawai Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dan petugas perpustakaan serta pengunjung perpustakaan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Ttd
Penulis,

Wiwin
NPM: 177310227

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintah	13
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	19
3. Konsep Otonomi Daerah.....	22
4. Konsep Kewenangan Daerah	26
5. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
6. Konsep Peranan.....	30
7. Konsep Membaca.....	33
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasionalisasi Variabel.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Key Informan dan Informan.....	43
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Sekilas tentang Kabupaten Pelalawan.....	48
B. Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan.	51
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Identitas Informan	55
B. Hasil Penelitian	57
1. Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat.....	58
a. Kelembagaan.....	58
b. Kebijakan.....	66
c. Sasaran	71
2. Hambatan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat	81
BAB VI : PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Kunjungan Pemustaka di Pustaka Pelalawan	9
I.2	Jumlah Pegawai Bidang Perpustakaan.....	11
II.1	Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat	41
III.1	Informan Penelitian.....	43
IV.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT/RW di Kabupaten Pelalawan.....	49
IV.2	Jumlah Pegawai di Lingkungan Kabupaten Pelalawan	50
IV.3	Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan	50
IV.4	Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan.....	55
V.1	Identitas Informan Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat	39
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Tanggapan Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwin
 NPM : 177310227
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021
 Pelaku Pernyataan,

Wiwin
 NPM: 177310227

**PERANAN DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN KABUPATEN
PELALAWAN DALAM MENINGKATKAN MINAT DAN KEBIASAAN
MEMBACA MASYARAKAT**

ABSTRAK

Wiwin

Kata Kunci: Peranan, Meningkatkan, Minat dan Kebiasaan Membaca

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan dan hambatan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat. Tipe penelitian survey deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari informan penelitian yakni dari pegawai Dinas, Pustakawan, dan pengunjung perpustakaan. Sementara data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumen yang mendukung masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data diperoleh dari lapangan direduksi, dianalisis, dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah berperan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Hasil ini diperoleh dari temuan penelitian yang ditetapkan pada indikator kelembagaan, kebijakan, dan sasaran. Adapun kendala atau hambatan yang ditemukan dalam usaha meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat yakni bangunan yang belum permanen (bangunan khusus), anggaran yang tidak terpenuhi, koleksi yang belum lengkap.

*THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF PELALAWAN ARCHIVES AND
LIBRARY IN INCREASING COMMUNITY READING INTEREST AND HABITS*

ABSTRACT

Wiwin

Keywords: Role, Improving, Interest and Reading Habits

The purpose of this study is to determine the role and obstacles of the Department of Archives and Libraries in Pelalawan Regency in Increasing Public Interest and Reading Habits. This type of research is a descriptive survey with a qualitative approach, the data sources come from research informants, namely from Dinas staff, librarians, and library visitors. Meanwhile, secondary data obtained in the form of documents that support the research problem. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The data obtained from the field are reduced, analyzed, and then conclusions are drawn. The results of the study concluded that the Department of Archives and Libraries has played a role in increasing people's interest and reading habits. These results are obtained from research findings set on institutional indicators, policies, and targets. The obstacles or obstacles found in an effort to increase people's interest and reading habits are non-permanent buildings (special buildings), unfulfilled budgets, incomplete collections.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah itu atas daerah kabupaten atau kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang- undang. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Era baru penyelenggaraan pemerintah daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan di atas salah satunya adalah urusan konkuren. Di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 11 disebutkan bahwa :

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan**
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Berdasarkan urusan pemerintahan di atas, maka dijelaskan dalam 12 ayat

(2) mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satu di dalamnya disebutkan pada huruf **q. Perpustakaan**. Dengan demikian jelaslah bahwa urusan di bidang perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang konkuren yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintahan daerah.

Perpustakaan diciptakan untuk masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat akan informasi maka masyarakat memelihara sumber informasi serta

mengembangkannya, khususnya masyarakat pengguna. Salah satu prinsip kepastakawanan menyatakan bahwa perpustakaan diciptakan oleh masyarakat dari dana masyarakat (lewat pajak dan sebagainya) yang bertujuan untuk melayani kepentingan dan permintaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sutarno (2003:32) perpustakaan adalah milik masyarakat, maksudnya bahwa perpustakaan dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan yang berada di sekitarnya. Perpustakaan untuk masyarakat, untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya.

Semua lapisan masyarakat apalagi anak-anak mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan umum. Perpustakaan umum memiliki peran membina dan mengembangkan minat baca masyarakat sejak dini. Hal ini berarti bahwa perpustakaan umum harus berupaya memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak-anak khususnya untuk mau dan mampu membaca serta menjadikan membaca tersebut sebagai kebiasaan dan kebutuhan bagi anak-anak. Jika hal tersebut telah terbentuk maka budaya baca akan dapat berkembang di masyarakat serta kegiatan belajar akan dapat berjalan sepanjang waktu (*life long learning*).

Perpustakaan memiliki beberapa peran penting dalam masyarakat, antara lain sebagai “jembatan” penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyambung peradaban manusia, serta menjadi salah satu sarana belajar masyarakat yang berprinsip pada *long life learning*. Selain perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah serta perpustakaan khusus, dalam keseharian masyarakat juga dikenal perpustakaan desa.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah daerah Kabupaten Pelalawan. Di mana pilihan wajib yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah pada bidang perpustakaan dan arsip. Bidang perpustakaan dan arsip sangat penting untuk diperhatikan, karena di sinilah letak berbagai informasi yang terdokumentasi dan juga sebagai lembaga dalam menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan minat bacanya dengan menyediakan beragam referensi.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan membangun perpustakaan. Perpustakaan dibangun untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menambah wawasannya.

Keberadaan perpustakaan setidaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui seluruh koleksi yang dimilikinya serta melalui layanan-layanannya. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat ini mau tidak mau harus diperoleh dengan proses membaca. Jadi salah satu tujuan adanya perpustakaan lainnya adalah untuk membantu meningkatkan minat baca dalam masyarakat.

Membaca adalah kegiatan ataupun aktivitas melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Tarigan (2008:9) mengatakan

tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi mencakup isi, memahami makna bacaan. Dengan demikian minat membaca merupakan upaya untuk menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan diri dengan melakukan aktivitas membaca.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa minat baca masyarakat terutama di beberapa daerah pelosok masih kurang. Ini terbukti dengan frekuensi kunjungan masyarakat ke beberapa perpustakaan yang minim yang juga dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi minat baca dan budaya baca masyarakat. Selain dikarenakan pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dewasa ini, kurangnya kunjungan ke perpustakaan juga dapat dikarenakan faktor-faktor dari perpustakaan itu sendiri, seperti letak perpustakaan dan keterjangkauannya bagi masyarakat.

Untuk menjalankan semua itu, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan kewenangan pada bidang kepustakaan yakni:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten;
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten;
3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten;
4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan, maka ditetapkanlah susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Arsip
 1. Seksi Pembinaan Arsip OPD
 2. Seksi Pembinaan Arsip BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Parpol
 3. Seksi Pembinaan Arsip Lembaga Pendidikan
- d. Bidang Pengelolaan Arsip
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
- e. Bidang Kepustakaan
 1. Seksi Pelayanan dan Pelestarian/Preservasi
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Salah satu Bidang yang memiliki tugas dan fungsi kepastakaan adalah Bidang Kepustakaan. Di mana Bidang Kepustakaan dalam menjalankan tugasnya dibentuk beberapa seksi untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Adapun tugas dan fungsi Bidang Kepustakaan yakni:

- (1) Bidang Kepustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kepustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Kepustakaan.

- (3) Kepala Bidang Kepustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepustakaan;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang kepustakaan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepustakaan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepustakaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Kepustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Kepala Seksi.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan dan Pelestarian/Preservasi
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Penelitian mengenai peningkatan minat dan kebiasaan membaca masyarakat yang merupakan tugas dari Bidang kepustakaan dalam menjalankan kewenangannya. Di mana untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah memiliki gedung perpustakaan dan 47.004 eksampler buku. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat didistribusikan jumlah pengunjung yang datang ke Perpustakaan Pelalawan berikut ini:

Tabel I.1 Data Jumlah Kunjungan di Pustaka Pelalawan

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan (Orang)	
		2019	2020
1	Januari	872	588
2	Februari	636	355
3	Maret	1044	252
4	April	486	19
5	Mei	217	23
6	Juni	213	86
7	Juli	214	144
8	Agustus	579	118
9	September	580	128
10	Oktober	674	164
11	November	688	181
12	Desember	185	113
Jumlah		6.388	2.171

Sumber: Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan, 2021.

Data pengunjung yang ditampilkan di atas terlihat jelas adanya perbedaan jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2019 dan tahun 2020. Di mana pada tahun 2019 jumlah pengunjung datang ke perpustakaan cukup besar jumlahnya, sementara pada tahun 2020 jumlah pengunjung bila dibandingkan dengan tahun 2019 sangat rendah.

Tabel I.2 Data Kunjungan Pemustaka Di Pustaka Pelalawan

No.	Pemustaka Menurut Kategori	Tahun (Jumlah Orang)	
		2019	2020
1	PAUD/TK	1.941	428
2	SD/Sederajat	784	376
3	SMP/Sederajat	2.035	349
4	SMA/Sederajat	983	214
5	Mahasiswa	39	340
6	Umum/Guru	492	402
7	Lembaga	97	64
Jumlah Keseluruhan		6.388	2.171

Sumber: Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan, 2021.

Berdasarkan tabel jumlah pengunjung di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat beberapa kategori pengunjung yang datang ke perpustakaan Pelalawan yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Kepustakaan. Di mana dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pengunjung terutama pada tahun 2020, dikarenakan adanya pelarangan atau pembatasan aktivitas di masa pandemi covid-19.

Berbagai program kerja yang ditetapkan pada Bidang Kepustakaan dalam rentang tahun 2016-2021 untuk meningkatkan minat dan kebiasaan masyarakat yakni tertuang dalam kinerja pelayanan dinas berikut:

1. Menyelenggarakan layanan mobil perpustakaan keliling.
2. Melaksanakan lomba mendongeng dan pemberian penghargaan dari Bupati Pelalawan bagi pemustaka.
3. Melaksanakan pelayanan extra pada *weekend* di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Memberikan pembinaan bagi pengelolaan perpustakaan yang ada di Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
5. Melaksanakan penambahan koleksi perpustakaan melalui pengadaan bahan bacaan.

Dari berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan minat baca masyarakat terutama melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan di berbagai wilayah seperti di desa. Terlihat hasil pada tahun 2019 lalu 5 (lima) perpustakaan desa di Kabupaten Pelalawan memperoleh bantuan program perpustakaan berbasis inklusif sosial

dari 45 total perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Di antaranya adalah: Perpustakaan Mekar Jaya Kecamatan Kerinci, Perpustakaan Lubuk Ogung Kecamatan Banda Sei Kijang, Perpustakaan Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut, Perpustakaan Ransang Kecamatan Pelalawan, dan Perpustakaan Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan.

Dari pengamatan lapangan yang penulis lakukan, diperoleh fenomena sebagai berikut;

1. Kurangnya inovasi bidang perpustakaan yang dibuat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Padahal inovasi dalam bidang perpustakaan merupakan hal penting untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Pelalawan yakni Pelalawan Cerdas.
2. Adanya kebijakan selama masa pandemi yang membatasi jumlah pegawai bekerja dalam satu ruangan, sehingga aktivitas perpustakaan tidak berjalan seperti biasanya dan waktu pelayanan terbatas. Selain itu adanya penghentian sementara aktivitas perpustakaan keliling, sehingga upaya Bidang Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat menjadi terhambat.
3. Letak perpustakaan yang jauh ke dalam dan tidak kelihatan dari jalan raya menjadi kendala bagi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Selain itu gedung yang digunakan sebagai perpustakaan bukan gedung milik sendiri atau masih pinjam pakai dengan instansi lain.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan Dinas Kearsipan dan

Kepustakaan Kabupaten Pelalawan terutama pada masa pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan demikian judul penelitian yang ditetapkan yakni: **“Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat?
- b. Apasaja hambatan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat.

- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan fungsi perpustakaan, serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai peran pemerintah, serta dapat bermanfaat untuk memberikan rumusan dan gagasan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

c. Kegunaan Akademis

Dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti serta mempelajari masalah peran dinas dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

a. Ilmu Pemerintahan

Sebelum melihat konsep teori dalam penelitian ini, terlebih dahulu diangkat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat (dalam Syafiie, 2003;34) bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Ilmu pemerintahan adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005;20).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2011;3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sebagai negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

b. Pemerintah

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata "perintah" yang ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Pemerintah adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005;11).

Budiarjo (2008;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah sesuatu negara

memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Kuper dalam Labolo (2006;20) pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson dalam Labolo (2006:20) setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya.

Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2006;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah.

c. Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie dkk (2005:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara, serta mendapatkan akhiran-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Ndraha (2011;6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2011;4) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002;14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi

keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2002 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sementara Ndraha (2011 ; 85) mengatakan fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah,

mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Konsep Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan di antaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (dalam Juanda, 2008 : 37). Budiardjo mengatakan pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (Juanda, 2008 : 37).

Menurut Widodo (2001;2) Pemerintahan lokal merupakan pemerintah didekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayani.

Menurut Huda (2007: 20) pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sunarno (2005:5) menyatakan sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- 1) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Pemerintahan desa.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak.

b. Prinsip Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsekuensi logis dari komitmen para *founding fathers* yang memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka melahirkan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas pemerintah pusat di satu sisi dan pemerintahan daerah di sisi lainnya. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*), hak dan kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom.

Konsep teori dari Pemerintahan Lokal (*local goverment*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local goverment* bagian negara maka konsep *local goverment* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *Federal*

serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan (Nurcholis, 2007:13).

Konsep *local goverment* berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein dalam Nurcholis (2007:1) menjelaskan bahwa *local goverment* memiliki tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom.

Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti sebagai daerah otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3. Konsep Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Menurut Salam (2004: 81) demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di berbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang artinya sendiri dan

“*nomos*” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari

praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut (Abdullah, 2007:5):

1) Prinsip otonomi luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2) Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah harus memiliki standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan Daerah

Kewenangan merupakan untuk kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Wasistiono (2008:9) menyatakan bahwa “urusan merupakan himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang di dalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Aktivitas tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat serta dunia usaha.

Menurut Miriam Budiardjo sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Sumber kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis (Wasistiono, 2005) :

- 1) Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbovoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri. Kewenangan pemerintahan karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hadjon (2005:1) wewenang pemerintahan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*),

sehingga wewenang dalam konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan.

Kabupaten dan kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah administratif dan juga sebagai daerah otonom telah berakhir karena konstelasi pemerintahan sedemikian itu cenderung mematkan kreativitas dan inovasi daerah dalam mengembangkan daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, status kabupaten dan kota tidak lagi sebagai wilayah administratif tetapi hanya sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan penyebutan dari Kota Madya menjadi kota karena Kota Madya mengandung konotasi tingkatan kota dalam arti kota kecil, kota sedang, dan kota besar padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.

5. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Menurut Himawan (2004:38) Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu

Sementara Admosudirjo (2001:3) mengatakan fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Admosudirjo (2001:7) menyebutkan kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.³

Kewenangan menurut Himawan (2004:51) adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya - sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

6. Konsep Peranan

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*persons task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 2015:215).

Menurut Soekanto (2015:210-211) “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Lebih lanjut Levinson dalam Soekanto (2015:215) mengatakan suatu peranan paling sedikit tiga hal berikut ini. a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pendapat Soekanto di atas, peneliti simpulkan bahwa peranan dari sebuah instansi sekurangnya terdapat 3 peran yakni kelembagaan, kebijakan, dan sasaran. Ketiga peran ini peneliti jadi indikator penelitian sebagai

tolak ukur untuk mengukur peranan sebuah instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat ini tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Menurut Thoha (2005:10) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

7. Konsep Membaca

Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara Mulyati (2007: 1.12). Membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Anderson (Akhadiah 1991: 22-24) memandang membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang kompleks yang menuntut kerjasama antara sejumlah kemampuan. Untuk dapat membaca suatu bacaan, seseorang harus dapat menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Pada waktu membaca mata mengenali kata, sementara pikiran menghubungkannya dengan maknanya. Makna kata dihubungkan satu sama lain menjadi makna frase, klausa, kalimat, dan akhirnya makna seluruh bacaan.

pemahaman akan makna bacaan ini tidak mungkin terjadi tanpa pengetahuan yang telah dimiliki dahulu, misalnya konsep-konsep yang terjadi dalam bacaan, tentang bentuk kata-kata, struktur kalimat, ungkapan dan sebagainya. Dengan singkat, pada waktu membaca, pikiran sekaligus memproses informasi, yang menyangkut hubungan antar tulisan dan bunyi bahasa. Informasi sintaksis, yaitu yang berhubungan dengan struktur kalimat, serta informasi, dan yang menyangkut aspek makna.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses penerjemahan tanda-tanda dan lambang-lambang ke dalam maknanya serta pemaduan makna baru ke dalam sistem kognitif dan afektif yang telah dimiliki pembaca.

Anderson (Akhadiah 1991: 23-24), mengemukakan lima ciri membaca :

- a) Membaca adalah proses konstruktif

Pengertian atau pemahaman pembaca mengenai suatu tulisan merupakan hasil pengolahan berdasarkan informasi yang terdapat dalam tulisan itu dipadukan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.

- b) Membaca harus lancar

Kelancaran membaca ditentukan oleh kesanggupan pembaca mengenai kata-kata. Artinya pembaca harus dapat menghubungkan tulisan dengan maknanya. Dari hasil penelitian ternyata bahwa konteks yang bermakna dapat mempercepat pengenalan.

- c) Membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat

Pembaca yang terampil dengan sendirinya akan menyesuaikan strategi

membaca dengan taraf kesulitan tulisan, pengenalannya tentang topik yang dibaca, serta tujuan membacanya. Pembaca yang terampil dengan cepat akan dapat menangkap jika ada kalimat atau informasi yang tidak relevan dalam bacaannya, sedangkan pembaca yang belum terampil tidak dapat melihatnya.

d) Membaca memerlukan motivasi

Motivasi merupakan kunci keberhasilan dalam belajar membaca. Membaca pada dasarnya adalah sesuatu yang menyenangkan.

e) Membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan.

Keterampilan tidak diperoleh secara mendadak atau dalam waktu singkat dan untuk selamanya. Keterampilan diperoleh melalui belajar, tahap demi tahap, dalam waktu yang panjang serta terus-menerus.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menetapkan beberapa referensi atau sumber rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

Pertama penelitian Oktariyani (2020) dalam jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul Upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Meningkatkan Minat Baca Di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam Meningkatkan Minat Baca di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur Yaitu di lihat dari (1) Koleksi Perpustakaan (2) Promosi Perpustakaan (3) Kualitas Layanan Perpustakaan. Dapat disimpulkan bahwa dari 3 upaya tersebut

mampu meningkatkan minat baca di Perpustakaan Daerah Kalimantan timur walaupun tidak signifikan karena pelaksanaan yang tidak mudah dan tentu saja ada kendala yang di hadapi pihak Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah.

Penelitian terdapat persamaan pada membahas mengenai dinas perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan metode penelitian kualitatif. Sementara perbedaan terletak dari lokasi penelitian dan indikator atau teori yang digunakan. Dengan demikian penelitian ini terhadap penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

Kedua Puspita Dwi Astuti (2015) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul Peran Perpustakaan Dan Arsip Dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat Di Perpustakaan Umum Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Perpustakaan dan Arsip dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat di Perpustakaan Umum Kota Bontang sudah cukup baik dalam mencakup perannya sebagai Fasilitator penghubung dan penyalur sumber informasi dengan penggunaanya di mana semua layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan arahnya untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi, sebagai Mediator menyediakan berbagai sumber informasi bagi penggunaanya, dan sebagai Motivator penggerak minat budaya baca yang bertanggung jawab terhadap pengembangan budaya baca di lingkungannya.

Penelitian terdapat persamaan pada membahas mengenai dinas perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan metode penelitian kualitatif. Sementara perbedaan terletak dari lokasi penelitian dan indikator atau teori yang

digunakan. Dengan demikian penelitian ini terhadap penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

Ketiga Adinda Nella Wisudayanti (2012) dalam Jurnal Ilmu Administrasi dengan judul Peran Perpustakaan Daerah dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat (Studi pada Perpustakaan Umum Taman Ekspresi Kota Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Daerah yaitu perpustakaan taman ekspresi telah melakukan perannya dengan baik untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Surabaya. Hal tersebut dapat diketahui melalui peran perpustakaan sebagai media yang menghubungkan sumber informasi dengan para pengunjung, sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dengan pengunjung, sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, sebagai fasilitator, mediator dan motivator, sebagai agen perubahan, agen pembangunan dan agen kebudayaan, sebagai lembaga pendidikan nonformal, sebagai pembimbing pengunjung perpustakaan, berperan dalam melestarikan koleksi bahan pustaka, sebagai ukuran atas kemajuan masyarakat, berperan untuk mengurangi kenakalan remaja.

Penelitian terdapat persamaan pada membahas mengenai dinas perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan metode penelitian kualitatif. Sementara perbedaan terletak dari lokasi penelitian dan indikator atau teori yang digunakan. Dengan demikian penelitian ini terhadap penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik penjelasan bahwa penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu dalam melihat peran Dinas Kearsipan dan

Kepustakaan. Namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar yakni lokasi penelitian yang berbeda, objek peneliti yakni meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat yang tidak diteliti peneliti sebelumnya, konsep teori yang digunakan berbeda. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pikir

Perpustakaan sebagai salah satu bentuk perpustakaan umum memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dengan menyediakan berbagai jenis koleksi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. Untuk menciptakan perpustakaan yang berkualitas diperlukan pembinaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar perpustakaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran di bawah ini :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
2. Dinas Kearsipan dan Kepustakaan adalah salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Pelalawan yang memiliki tugas dan fungsi meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

3. Perpustakaan adalah pusat informasi yang di dalamnya terdapat berbagai sumber referensi berupa buku dan dokumen dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
4. Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat adalah melakukan upaya-upaya berdasarkan tugas dan fungsi yang diembankan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca di masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kelembagaan dalam penelitian ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasaran kepustakaan, serta anggaran yang dimiliki Dinas
 - b. Kebijakan dalam penelitian ini adalah program kerja dan pelaksanaan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan.
 - c. Sasaran dalam penelitian ini adalah adanya pelayanan yang diberikan dan meningkatkan jumlah kegiatan di perpustakaan dalam usaha meningkatkan minat baca masyarakat.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.1 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Peran Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)". Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2015:210-211)	Peran Dinas Kearsipan dan Kepustakaan	Kelembagaan	a. Sumber daya manusia b. Sarana dan Prasarana keputakaan c. Anggaran
		Kebijakan	a. Program kerja b. Pelaksanaan program kerja
		Sasaran	a. Pelayanan b. Meningkatkan jumlah kegiatan c. Meningkatkan minat masyarakat ke perpustakaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 7) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Sedangkan deskriptif menurut Sugiyono (2013: 11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian tipe penelitian survey deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti melalui pendekatan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan. Di mana di Kabupaten Pelalawan telah terdapat beberapa perpustakaan umum milik daerah yang dibangun dan dioperasikan. Namun tingkat pengunjung yang datang setiap harinya untuk membaca, meminjam, maupun mencari sumber informasi lainnya di perpustakaan masih sangat kurang

jumlahnya. Peneliti memfokuskan pada perpustakaan besar yang ada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dikelola oleh Dinas.

C. Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan. Informan penelitian ini meliputi dua macam yakni key informan dan informan.

Tabel III.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Status	Jumlah	Keterangan
1.	Hijra Mardhra	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 orang	Informan Utama
2.	Nelti Roza	Pustakawan	1 orang	Informan
3.	Tania	Pengunjung	1 orang	Informan
4.	Wantika Sari	Pengunjung	1 orang	Informan
5.	T. Ayu Citra Ningsih	Pengunjung	1 orang	Informan
6.	Anggi Yanto	Pengunjung	1 orang	Informan
7.	Aarliis	Pengunjung	1 orang	Informan
Jumlah			7 orang	

Sumber: Data Olahan, 2021.

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk informan ditetapkan yakni Pegawai Pustaka atau Pustakawan, serta masyarakat pengunjung perpustakaan.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis membagi langsung ke dalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Jawaban informan terhadap beberapa pertanyaan wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa:

- a. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan
- b. Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan
- c. Program Kerja atau Rencana Strategis Dinas
- d. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari Dinas Kearsipan dan

Kepustakaan Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah diarsipkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Data-data diperoleh dari lapangan harus dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data biasanya menggunakan analisis persepsionis. Teknik persepsionis adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan

sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama

bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara $1,25^{\circ}$ Lintang Utara sampai $0,20^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $100,42^{\circ}$ Bujur Timur sampai $103,28^{\circ}$ Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Pelalawan yakni:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak);

Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih $13.067,29 \text{ Km}^2$. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu $4.113,03 \text{ Km}^2$ (31,48 %) dan yang paling kecil

adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 217,26 Km² atau 1,66 % dari luas Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2020, kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 104 Desa. Jumlah RT dan RW di Kabupaten Pelalawan berjumlah sebanyak 2.005 dan 681.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT/RW di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan			Jumlah RT/RW	
		Kelurahan	Desa	Jumlah	RT	RW
1	Langgam	1	7	8	137	46
2	Pangkalan Kerinci	3	4	7	297	59
3	Bandar Sei Kijang	1	4	5	70	29
4	Pangkalan Kuras	1	16	17	271	79
5	Ukui	1	11	12	246	67
6	Pangkalan Lesung	1	9	10	159	61
7	Bunut	1	9	10	108	51
8	Pelalawan	1	8	9	119	51
9	Bandar Petalangan	1	10	11	124	54
10	Kuala Kampar	1	9	10	165	63
11	Kerumutan	1	9	10	181	64
12	Teluk Meranti	1	8	9	128	57
Jumlah		14	104	118	2.005	681

Sumber: Pelalawan Dalam Angka, 2021.

Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 sebanyak 4.699 orang. Komposisi pegawai negeri didominasi lulusan Sarjana yaitu 74,27 % (3.490 orang) dan lulusan Diploma yaitu 13,43 % (631 orang). Sedangkan jumlah pegawai negeri terbanyak ada di Dinas Pendidikan mencapai 2.287 orang dengan jumlah lulusan Sarjana sebanyak 1.966 orang dan lulusan Diploma sebanyak 187 orang.

Tabel IV.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kabupaten Pelalawan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional tertentu	789	1.834	2.623
2	Fungsional utama	754	602	1.356
3	Struktural	465	255	720
	Jumlah	2.008	2.691	4.699

Sumber: Pelalawan Dalam Angka, 2021.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September), jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2020 adalah 390.046 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 201.685 jiwa dan perempuan 188.361 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 94.585 jiwa dan terendah di Bunut 15.465 jiwa. Sex Ratio Kabupaten Pelalawan di tahun 2020 adalah 107. Ini menandakan jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Langgam	17.189	15.808	32.997
2	Pangkalan Kerinci	48.673	45.912	94.585
3	Bandar Sei Kijang	11.180	10.301	21.481
4	Pangkalan Kuras	31.538	29.585	61.123
5	Ukui	20.848	19.450	40.298
6	Pangkalan Lesung	15.459	14.373	29.832
7	Bunut	7.942	7.523	15.465
8	Pelalawan	10.115	9.005	19.120
9	Bandar Petalangan	8.458	7.989	16.447
10	Kuala Kampar	9.240	8.597	17.837
11	Kerumutan	12.561	11.859	24.420
12	Teluk Meranti	8.482	7.959	16.441
	Jumlah	201.685	188.361	390.046

Sumber: Pelalawan Dalam Angka, 2021.

B. Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan

Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten dibentuk sejak berdirinya Kabupaten Pelalawan pada tahun 1999. Kemudian seiring berjalannya waktu dan berubahnya berbagai kebijakan, maka keberadaan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan tetap ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan, menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Secara Prima sebagai Pemberdayaan Potensi Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bangsa dan Negara di Kabupaten Pelalawan Tahun 2030*

Misi:

1. Membina dan mengembangkan serta mendayagunakan semua jenis kearsipan dan kepustakaan.
2. Membina dan mengembangkan serta memprioritaskan kualitas kearsipan dan kepustakaan
3. Membina, mengembangkan dan meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat
4. Melestarikan bahan arsip dan perpustakaan sebagai hasil budaya bangsa
5. Menyelenggarakan layanan kearsipan dan kepustakaan.

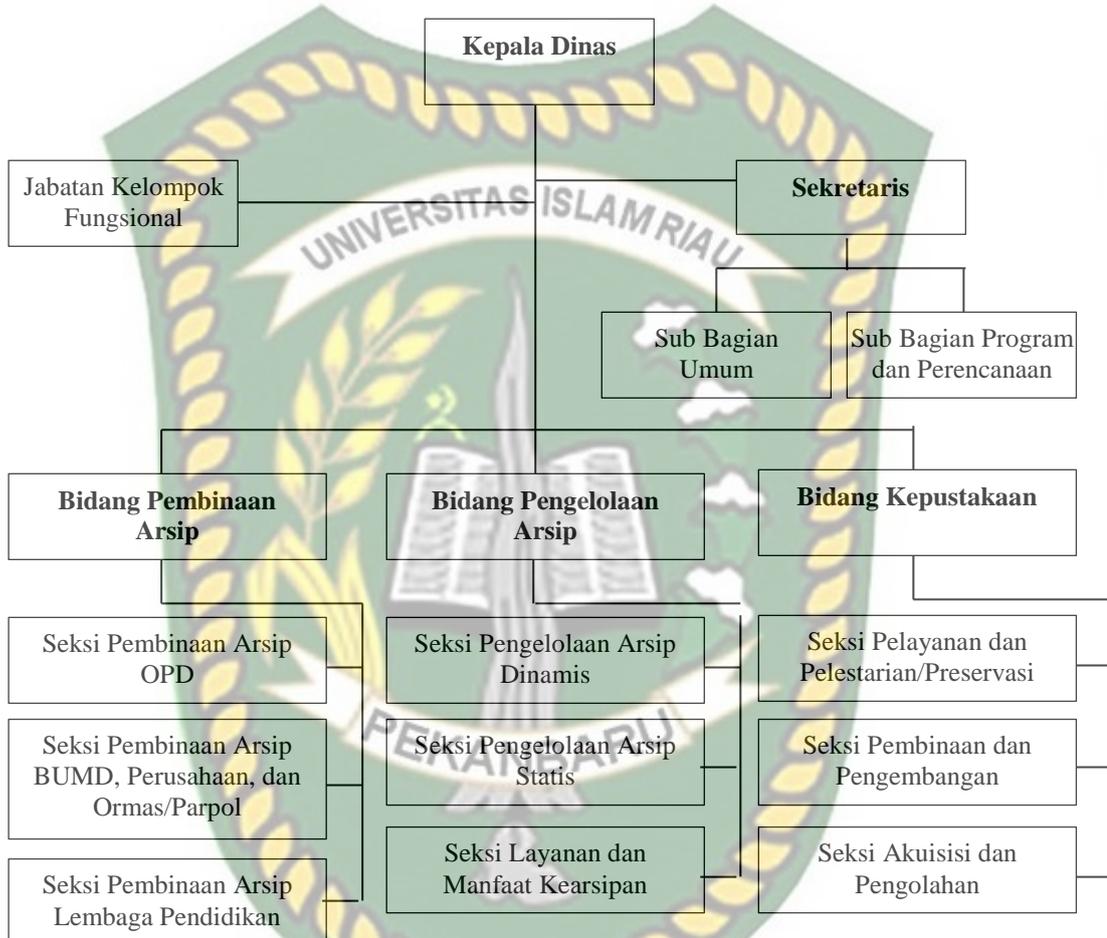
Dari Peraturan Bupati di atas, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan berikut:

- 
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pembinaan Arsip
 1. Seksi Pembinaan Arsip OPD
 2. Seksi Pembinaan Arsip BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Parpol
 3. Seksi Pembinaan Arsip Lembaga Pendidikan
 - d. Bidang Pengelolaan Arsip
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
 - e. Bidang Kepustakaan
 1. Seksi Pelayanan dan Pelestarian/Preservasi
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Salah satu bidang yang berwenang menjalankan aktivitas kepastakaan adalah Kepustakaan. Di mana bidang ini memberikan pelayanan kepastakaan kepada masyarakat, sehingga dengan pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan minat baca. Untuk mencapai minat baca masyarakat, maka beragam kegiatan dan program harus dilaksanakan agar masyarakat mau datang

keperustakaan untuk membaca ataupun mencari referensi-referensi lainnya yang dibutuhkan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan



Sumber: Dinas Kearsipan dan Kepustakaan, 2021.

Untuk mendukung aktivitas di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan, maka diisi sejumlah pegawai dalam hal menjalankan kewenangan di bidang kearsipan dan kepastakaan. Adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan sebagai berikut:

Tabel IV.4 Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMA	5	3	8
2	Diploma	1	1	2
3	Sarjana	14	6	20
Jumlah		20	10	30

Sumber: Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan, 2021.

Berdasarkan data jumlah pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan tersebut, maka dapat dipisahkan jumlah pegawai yang ada di Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer.

Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Perpustakaan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang	1
2	Pustakawan	2
3	Kepala Seksi	2
4	Staf Seksi	3
5	Petugas Pelayanan	7
6	Petugas Pusling	2
7	Supir	1
Jumlah		18

Sumber: Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Pelalawan, 2021.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini, sehingga identitas dari informan yang menjadi sumber data primer perlu ditampilkan sebagai bentuk keterbukaan data yang diperoleh. Untuk itu pada penelitian ini peneliti memaparkan secara singkat mengenai identitas informan yakni mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan.

Melalui identitas informan ini dapat memberikan gambaran sumber informasi yang diperoleh bisa menjawab permasalahan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat identitas informan pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Hijra Mardhra	41	Perempuan	S-2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Nelti Roza	45	Perempuan	D-III	Pustakawan
3	Tania	22	Perempuan	S-1	Wiraswasta
4	Wantika Sari	22	Perempuan	S-1	Wiraswasta
5	T. Ayu Citra Ningsih	21	Perempuan	SMA	Mahasiswa
6	Anggi Yanto	23	Laki-laki	SMA	Mahasiswa
7	Arliis	25	Perempuan	S-1	Wiraswasta

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Data yang ditampilkan pada tabel di atas memberi gambaran identitas informan secara jelas. Di mana dari segi usia informan berada pada rentang usia 21 – 45 tahun, sehingga dari segi usia para informan masih berada pada kategori

yang sangat produktif. Sementara dari segi jenis kelamin telah terwakili dari masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari tingkat pendidikan diketahui bahwa para informan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi yakni dari terendah tamatan SMA dan tertinggi berada pada jenjang pendidikan akhir strata dua (S-2). Kemudian dari jenis pekerjaan para informan berasal dari pegawai Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan, Petugas Perpustakaan, dan pengunjung yang berlatar belakang pekerjaan mahasiswa sampai wiraswasta.

Gambaran mengenai identitas informan di atas menjelaskan bahwa para informan adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan perpustakaan dan menetapkan program kerja untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Sementara dari segi pengujung merupakan orang-orang yang senantiasa membutuhkan berbagai macam referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik itu dalam mendukung pendidikannya maupun dalam mendukung aktivitas usaha atau pekerjaan yang digelutinya.

Dengan demikian, para informan di atas adalah orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas keaktifan perpustakaan sebagai pusat informasi dan data. Hadirnya perpustakaan memberi pencerahan tersendiri bagi para informan dalam mendapatkan berbagai pengetahuan dan referensi yang bermanfaat.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan uraian atas permasalahan yang diteliti melalui peroleh data dari informan yang diwawancarai, observasi atau pengamatan lapangan, dan dokumentasi-dokumentasi pendukung yang memperkuat hasil dari penelitian ini.

Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dilihat sangat penting dalam menumbuhkan minat baca dan kebiasaan masyarakat, sehingga Dinas harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh elemen dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat. Minat baca dan kebiasaan membaca sangat penting untuk ditingkatkan, mengingat membaca merupakan jendela dari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan berbagai komponen pelaksanaannya yang salah satunya adalah tersedianya perpustakaan.

Perpustakaan merupakan pusat dari kumpulan-kumpulan dokumen baik itu yang tertulis atau dibukukan maupun melalui tulisan yang bersifat elektronik. Melalui perpustakaan sumber ilmu pengetahuan yang tertulis dapat terjaga dengan baik dan dapat dibaca oleh para pembaca dengan mudah. Untuk itu kehadiran perpustakaan sangat penting artinya dalam menyediakan sarana prasarana dokumen dan juga memudahkan bagi pembaca untuk mendapatkan berbagai informasi ilmu pengetahuan.

Untuk itu pada penelitian ini, peneliti merasa penting untuk melihat peranan dari Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Di karena telah

ada instansi tertentu yang ditetapkan untuk melaksanakan fungsi pemerintah yakni pelayanan pada bidang kepastakaan. Dalam memberikan pelayanan bidang kepastakaan telah dipersiapkan gedung, dokumen-dokumen (buku, artikel, dan lainnya), serta sarana prasarana pendukung.

Pada penelitian, maka ditetapkan 3 indikator peranan yang ditarik dari pendapatan Levinson dalam Soekanto (2004) tentang peranan. Di mana dari pendapat tersebut peneliti terjemahkan menjadi 3 yakni kelembagaan, kebijakan, dan sasaran.

1. Peranan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat

a. Kelembagaan

Kelembagaan dalam penelitian ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasaran kepastakaan, serta anggaran yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat pembaca.

1). Sumberdaya

Sumberdaya dalam penelitian adalah kecukupan jumlah petugas yang ditempatkan pada perpustakaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pembaca. Di mana sumber daya di sini hanya dilihat dari segi jumlah atau kuantitasnya saja, sehingga dengan jumlah yang ada dapat terpenuhi semua pos-pos pelayanan yang ada di perpustakaan.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan sebanyak 34 orang dan yang ditugaskan untuk menangani perpustakaan sebanyak 23 orang (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam memberikan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat yang datang membaca terdapat sebanyak 23 orang petugas. Di mana dari jumlah tersebut ada yang memberikan pelayanan kepada pengunjung, ada bagian penataan dokumen, ada bagian administrasi, dan ada juga bagian supir pada mobil keliling yang disiapkan untuk menjangkau lebih dekat kepada masyarakat pembaca.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Jumlah pegawai yang ada di Perpustakaan sebanyak 23 orang dan jumlah ini sudah mencukupi (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi dari informan di atas menjelaskan bahwa dengan jumlah pegawai perpustakaan sebanyak 23 orang dianggap telah tercukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya pegawai dengan jumlah yang mencukupi ini tentunya masalah pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi kendala, sehingga usaha untuk tetap memberikan pelayanan dan meningkatkan minat membaca masyarakat bisa terlaksana.

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Pegawai perpustakaan sangat cukup dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan yang disampaikan Wantika Sari salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Pegawai perpustakaan memberikan pelayanan yang cukup baik, pegawai ramah dan bijak dalam pemberitahuan akan aturan diperpustakaan (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Kemudian tanggapan wawancara yang disampaikan T. Ayu Citra Ningsih salah seorang pengunjung perpustakaan yakni:

Kecukupan pegawai perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pembaca sudah baik. Pegawai sudah mengikuti prosedur atau standar pelayanan sebagai pustakawan (Wawancara pada pukul 10.00 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Sementara tanggapan yang diberikan Anggi Yanto salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Jumlah pegawai perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pembaca sudah tercukupi dan sangat ramah (Wawancara pada pukul 11.00 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Sedangkan hasil wawancara dengan Arliis salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Jumlah pegawai cukup banyak. Tetapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pembaca, sebagai pegawai perpustakaan terlihat cuek atau acuh (Wawancara pada pukul 11.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Tanggapan yang disampaikan oleh para informan dan juga selaku pengunjung memberikan informasi bahwa jumlah pegawai yang memberikan pelayanan keperpustakaan sudah cukup baik. Selain itu dalam memberikan pelayanan pegawai perpustakaan sangat ramah dan sopan, serta membantu pengunjung dalam mencari kebutuhan referensi yang dibutuhkan.

Hasil pengamatan lapangan atau observasi terlihat sangat jelas keberadaan petugas perpustakaan dalam memberikan pelayanan dari segi jumlah sudah sangat terpenuhi. Di mana terdapat petugas penerima tamu atau pencatat pengunjung yang datang selalu ada di tempatnya, kemudian petugas yang menjaga komputer sebagai pusat informasi senantiasa melayani masyarakat pengunjung untuk menemui sumber referensi yang dibutuhkan. Selain itu di masing-masing ruang baca terdapat satu orang petugas yang selalu menanti pengunjung dan memberikan pelayanan apabila ada pengunjung yang membutuhkan informasinya.

Sementara untuk beberapa petugas tidak terlihat berada di ruang membaca, dikarenakan memiliki tugas lain yang tidak terlihat dari luar. Untuk petugas lapangan atau supir terlihat berada di dekat mobil perpustakaan keliling, tetapi tidak bisa beraktivitas dikarenakan adanya pembatasan keramaian.

Dengan demikian dari segi kecukupan sumber daya manusia yang ada di perpustakaan dalam memberikan pelayanan secara keseluruhan sudah sangat memadai, sehingga dengan kekuatan sumber daya manusia yang ada dapat memberi arti bahwa telah ada peran dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan dalam menyiapkan petugas pelayan perpustakaan.

2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas utama dan pendukung yang ada di perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pembaca. Melalui sarana dan prasarana yang tersedia mampu mendukung pelayanan perpustakaan yang dijalani petugas dalam usaha meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dalam memberikan pelayanan perpustakaan yakni gedung, mobil perpustakaan keliling, ruang baca, komputer, tempat bermain anak-anak, wifi gratis (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pelayanan perpustakaan telah tersedia gedung khusus yang diperuntukkan untuk perpustakaan, mobil perpustakaan keliling, ruang baca, tempat bermain anak-anak, komputer katalog, dan telah disediakan wifi gratis bagi penunjang. Adanya sarana dan prasarana yang disediakan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi dan memunculkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Sarana prasarana yang dimiliki perpustakaan dalam memberikan pelayanan perpustakaan ada WIFI gratis, ada komputer, ruang baca, ada tempat bermain anak-anak (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi di atas sangat jelas menggambarkan bahwa telah tersedia beragam sarana dan prasarana utama maupun pendukung yang disiapkan pada aktivitas perpustakaan. Dengan demikian, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada sudah cukup mendukung aktivitas perpustakaan yang baik, sehingga masyarakat dengan nyaman untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi.

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung

Perpustakaan bahwa:

Adanya fasilitas seperti meja, kursi serta tempat yang bersih, sehingga nyaman bagi pengunjung untuk membaca (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan yang disampaikan Wantika Sari salah seorang pengunjung

Perpustakaan bahwa:

Sarana dan prasarana sangat membantu tentunya, terutama bagi pelajar yang ingin meminjam buku maupun membaca ditempat. kelengkapan buku serta fasilitas cukup memadai untuk digunakan diperpustakaan ini (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Kemudian tanggapan wawancara yang disampaikan T. Ayu Citra Ningsih

salah seorang pengunjung perpustakaan yakni:

Sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan membantu dalam mempermudah masyarakat untuk membaca yakni fasilitas WiFi, ruang baca yang cukup nyaman, koleksi bahan bacaan yang memadai (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Sementara tanggapan yang diberikan Anggi Yanto salah seorang

pengunjung perpustakaan adalah:

Sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan membantu dalam mempermudah masyarakat untuk membaca ada WIFI, ruangan membaca, dan buku yang memadai (Wawancara pada pukul 11.00 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Sedangkan hasil wawancara dengan Arliis salah seorang pengunjung

perpustakaan adalah:

Sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan membantu dalam mempermudah masyarakat untuk membaca seperti WIFI, tempat bermain anak-anak (Wawancara pada pukul 11.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Pengunjung yang di wawancarai diatas memberikan tanggapan mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di perpustakaan. Di mana telah ada fasilitas seperti meja, kursi serta tempat yang bersih, sehingga nyaman bagi pengunjung untuk membaca, adanya fasilitas peminjaman buku, adanya fasilitas WiFi, ruang baca yang cukup nyaman, koleksi bahan bacaan yang memadai, dan ada tempat bermain anak-anak.

Observasi lapangan ditemukan bahwa telah ada sarana dan prasarana utama dan pendukung yang disediakan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat melalui perpustakaan. Di mana terdapat satu buah gedung yang cukup memadai sebagai sebuah perpustakaan, jumlah koleksi atau buku yang beraneka kategori, ruang-ruang baca yang nyaman, ruang khusus tempat anak-anak membaca dan bermain, tersedianya fasilitas wifi untuk memudahkan pengujung mengakses koleksi elektronik, komputer katalog yang memudahkan dalam pencarian judul buku dan letak buku tertentu, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang mendukung aktivitas perpustakaan Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian dari segi sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan dan memanjakan pengunjung perpustakaan. Hasil ini tentunya memberikan gambaran bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi perpusakaan.

3). Anggaran

Anggaran adalah sumber dana yang diperuntukkan dalam pengelolaan perpustakaan dan dananya dialokasikan setiap tahun sesuai kebutuhan yang direncanakan. Namun penentuan akhir dari jumlah anggaran yang dibutuhkan tergantung dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga Dinas Kearsipan dan Kepustakaan hanya menetapkan rencana anggaran yang dibutuhkan dan bisa saja terpenuhi serta bisa saja tidak terpenuhi.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bidang perpustakaan dalam 1 tahun tidak menentu terkadang ada rasionalisasi ataupun perubahan, Anggaran tahun 2021 sekitar Rp. 500.000.000,- Anggaran ideal yang diperuntukkan untuk meningkatkan minat baca dan kebiasaan masyarakat diperkirakan sekitar 1,2 M (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perpustakaan setiap tahunnya dibutuhkan dana berkisar Rp. 1,2 Milyar. Dengan jumlah dana yang ditetapkan tersebut bisa dilaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, tetapi dikarenakan beberapa hal pada tahun 2021 jumlah dana yang dialokasikan hanya lebih kurang 45% dari yang dibutuhkan.

Alokasi anggaran yang diterima Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dalam pengelolaan perpustakaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berbagai program untuk meningkatkan minat dan kebiasaan masyarakat menjadi berkurang. Di mana dalam tahun 2021 tidak ada lagi aktivitas mobil perpustakaan

keliling, sehingga mobil perpustakaan keliling hanya parkir di areal parkir gedung perpustakaan tanpa ada aktivitas dan petugas hanya bisa membantu pegawai lain di gedung perpustakaan. Berbagai macam perlombaan untuk anak-anak yang menjadi sasaran utama membaca ditiadakan, sehingga program-program meningkatkan minat baca masyarakat hanya sebatas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke perpustakaan.

Dengan demikian dari segi anggaran Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah mendapatkan alokasi anggaran setiap tahunnya. Namun besaran anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga berbagai program meningkatkan minat baca masyarakat tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan dari sub indikator di atas, maka dapat dikatakan bahwa indikator kelembagaan telah terpenuhi dari segi sumber daya, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran yang diterima Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.

b. Kebijakan

Kebijakan dalam penelitian ini adalah program kerja dan pelaksanaan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan. Di mana kebijakan dijalani Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dengan menetapkan program kerja dan pelaksanaan program kerja dalam upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

1) Program Kerja

Program kerja adalah program yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam usaha meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat melalui keberadaan perpustakaan. Di mana dengan program kerja yang terarah dan terukur serta dilaksanakan secara kontinu diharapkan tumbuhnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat terutama di Kabupaten Pelalawan melalui perpustakaan yang ada.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Program kerja yang ditetapkan untuk meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat adalah lomba mendongeng, perpustakaan keliling, penghargaan kepada yang sering berkunjung ke perpustakaan. Target yang hendak dicapai dari program kerja tersebut untuk menambah minat baca pengunjung perpustakaan (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi di atas diketahui bahwa telah ada program kerja yang ditetapkan untuk meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat adalah lomba mendongeng, perpustakaan keliling, penghargaan kepada yang sering berkunjung ke perpustakaan. Target yang hendak dicapai dari program kerja tersebut untuk menambah minat baca pengunjung perpustakaan.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Program kerja yang ditetapkan untuk meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat yakni: 1, Lomba mendongeng 2, Penghargaan untuk yang sering berkunjung ke perpustakaan. Target yang hendak dicapai dari program kerja tersebut ialah untuk meningkatkan

jumlah pengunjung perpustakaan (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa program kerja yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan dalam upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca di masyarakat terutama pada masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Adapun kegiatannya yakni dalam bentuk menyediakan fasilitas perpustakaan keliling, memberikan penghargaan kepada pengunjung yang datang ke perpustakaan, mengadakan lomba-lomba yang berkenaan dengan perpustakaan seperti mendongeng. Kemudian ada program kerja yang dalam bentuk berkesinambungan yakni menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah terutama pada sekolah PAUD dan TK.

Pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat dari segi sarana prasarana telah dipersiapkan mobil perpustakaan keliling dan terdapat beberapa dokumentasi tentang kegiatan seperti lomba dan pemberian penghargaan kepada pengunjung. Hasil ini menjelaskan bahwa telah ada program kerja yang ditetapkan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan beberapa program kerja untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Adanya program kerja diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung yang datang untuk membaca di tempat ataupun meminjam buku.

2). Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja adalah pelaksanaan atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk program kerja, sehingga dengan pelaksanaan program

kerja yang dijalani dapat terlihat upaya atau langkah yang dibuat dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan 2 tahun ini terkendala karena covid 19, sehingga tidak berjalan semestinya. Pencapaian terbaik dari pelaksanaan program kerja di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan yakni dengan memperoleh penghargaan untuk perpustakaan mendapat predikat B (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan di Perpustakaan yakni ada sebagian proses yang tidak berjalan seperti perpustakaan keliling dikerenakan Covid-19. Pencapaian dari pelaksanaan program kerja adalah mendapatkan penghargaan sebagai perpustakaan (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan yang disampaikan 2 orang informasi di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan. Namun dalam 2 tahun terakhir ini ada kendala penyebaran covid 19, sehingga program yang telah ditetapkan tidak berjalan semestinya. Adapun pencapaian terbaik dari pelaksanaan program kerja di Dinas Kearsipan dan Kepustakaan yakni dengan memperoleh penghargaan untuk perpustakaan mendapat predikat B dari badan perpustakaan nasional.

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di perpustakaan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang ke perpustakaan (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Dalam pelaksanaan program kepastakaan telah ada kegiatan pelayanan di perpustakaan, sehingga pelayanan perpustakaan berjalan dengan baik. Pengunjung dilayani dengan baik oleh petugas perpustakaan dan selalu memantau aktivitas pengunjung serta turut membantu atas kebutuhan yang diperlukan pengunjung. Aktivitas pelayanan yang ada di perpustakaan sudah berjalan dengan baik, sehingga ada kepuasan yang dirasakan pengunjung pada saat mencari referensi, membaca, dan lainnya.

Tanggapan yang disampaikan Wantika Sari salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Pelayanan sangat baik, selain keramah tamahan pegawai, meminjam buku juga mudah dilakukan (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Kemudian tanggapan wawancara yang disampaikan T. Ayu Citra Ningsih salah seorang pengunjung perpustakaan yakni:

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di perpustakaan kepada masyarakat yang datang membaca ataupun berkunjung sudah baik, pustakawan nya ramah (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Pelayanan yang diberikan penyelenggara perpustakaan kepada pengunjung sudah sangat baik, terlihat petugas perpustakaan ramah dalam memberikan pelayanan. Sementara aktivitas perpustakaan disiapkan untuk kebutuhan meminjam buku dan membaca di tempat.

Hasil pengamatan lapangan atau observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa dalam melaksanakan program kerja telah ada beberapa petugas yang selalu

menanti pengunjung dan mengawasi aktivitas pengunjung, serta petugas selalu siap memberikan bantuan kepada pengunjung yang mencari referensi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan program kerja untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Adanya pelaksanaan program kerja dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada pengunjung membuat pengunjung menjadi betah dan puas selama berada diperpustakaan.

Berdasarkan hasil tanggapan dan observasi, maka dapat dikatakan indikator kebijakan sudah berjalan dengan baik. Di mana Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Pelalawan telah menyiapkan program kerja dan melaksanakan program kerja yang ditetapkan, sehingga berdampak dalam meningkatkan kebiasaan dan minat baca masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah adanya pelayanan yang diberikan dan meningkatkan jumlah kegiatan di perpustakaan dalam usaha meningkatkan minat baca masyarakat.

1). Pelayanan

Pelayanan merupakan kesiapan dan kesediaan petugas dalam menjalankan aktivitas perpustakaan. Di mana pelayanan perpustakaan menjadi penting untuk diperhatikan dalam usaha menjalankan aktivitas perpustakaan, sehingga pengunjung menjadi puas atas pelayanan yang disiapkan.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Jenis pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat berupa perpustakaan keliling, adanya ruang baca, tempat bermain anak-anak, wifi gratis, dan penyediaan computer sebagai katalog (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada beberapa jenis pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat berupa perpustakaan keliling, adanya ruang baca, tempat bermain anak-anak, wifi gratis, dan penyediaan computer sebagai katalog.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Jenis pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat adalah memberikan pelayanan ditempat pada hari Senin - kamis 08.00-16.00, jum'at - sabtu 08.00-16.30 (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa jenis pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat adalah memberikan pelayanan di tempat kepada setiap pengunjung yang datang, yakni pada hari Senin - kamis 08.00-16.00, jum'at - sabtu 08.00-16.30.

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Pegawai perpustakaan dalam memberikan Pelayanan cukup baik, memiliki sopan santun terhadap pengunjung, dan cepat menanggapi pengunjung

dalam menanyakan sesuatu yang berkaitan tentang perpustakaan misalnya; buku yang tidak ditemukan oleh pengunjung (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pegawai perpustakaan dalam memberikan pelayanan cukup baik, memiliki sopan santun terhadap pengunjung, dan cepat menanggapi pengunjung dalam menanyakan sesuatu yang berkaitan tentang perpustakaan misalnya; buku yang tidak ditemukan oleh pengunjung.

Sementara tanggapan yang diberikan Anggi Yanto salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Pelayanan yang diberikan pegawai perpustakaan yakni dengan selalu bertanya apa yang masyarakat butuhkan jika ke perpustakaan (Wawancara pada pukul 11.00 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai perpustakaan kepada seluruh pengunjung yang datang yakni dengan selalu bertanya apa yang masyarakat butuhkan jika ke perpustakaan. Kemudian membantu masyarakat pengunjung dalam mencari referensi dan menunjuk tempat untuk membaca maupun untuk mendapatkan fasilitas peminjaman buku.

Sedangkan hasil wawancara dengan Arliis salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pegawai perpustakaan kurang baik karena sebagai pegawai kurang ramah dan terkesan acuh dan cuek (Wawancara pada pukul 11.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pegawai perpustakaan kurang baik karena sebagai pegawai

kurang ramah dan terkesan acuh dan cuek. Pemberian pelayanan kepada pengunjung tidak dilakukan oleh seluruh pegawai, sehingga pegawai perpustakaan yang tidak bertugas melayani terlihat kurang perhatian kepada pengunjung perpustakaan yang datang.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa dalam memberikan pelayanan petugas sudah ada di pintu masuk untuk mendata pengunjung yang hadir dan memberikan petunjuk kepada pengunjung untuk ruang buku dan ruang baca. Kemudian petugas mengawasi aktivitas pengunjung selama berada di perpustakaan dan membantu kesulitan pengunjung seperti mencari referensi dan lainnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa petugas pelayanan perpustakaan telah memberikan pelayanan kepada pengunjung, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik akan menarik minat masyarakat untuk datang membaca, meminjam buku dan sebagainya.

2). Meningkatkan Jumlah Kegiatan

Meningkatkan jumlah kegiatan merupakan bagian dalam usaha yang dilakukan Dinas Perpustakaan dalam menarik minat masyarakat untuk membaca buku. Di mana jumlah kegiatan yang dilakukan sangat penting, dikarenakan dengan banyaknya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan berdampak pada kebiasaan masyarakat untuk masa mendatang dalam hal membaca.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Kegiatan yang dilakukan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat dengan melakukan penambahan bahan baca. Petugas perpustakaan merealisasi dari kegiatan pelayanan yang ditetapkan telah sesuai tupoksi yang ditetapkan (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada kegiatan yang dilakukan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat dengan melakukan penambahan bahan baca. Adanya penambahan bahan baca atau buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan yang selalu dicari pengunjung akan memberikan dampak yang cukup baik bagi pertumbuhan minat baca masyarakat. selain itu petugas perpustakaan merealisasi dari kegiatan pelayanan yang ditetapkan telah sesuai tupoksi yang ditetapkan, sehingga pelayanan perpustakaan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengunjung.

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Kegiatan yang di berikan oleh dinas kearsipan dan perpustakaan salah satu memberikan penghargaan kepada pengunjung yang aktif da sering berkunjung ke perpustakaan, tujuan adalah agar memberi penyemangat kepada penunjung (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informan di atas juga menjelaskan bahwa kegiatan yang di berikan oleh dinas kearsipan dan perpustakaan salah satu memberikan penghargaan kepada pengunjung yang aktif da sering berkunjung ke perpustakaan, tujuan adalah agar memberi penyemangat kepada penunjung.

Tanggapan yang disampaikan Wantika Sari salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sering berkunjung (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Kemudian tanggapan wawancara yang disampaikan T. Ayu Citra Ningsih salah seorang pengunjung perpustakaan yakni:

Kegiatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi terlihat mengarahkan pengunjung untuk absen kunjungan, pelayanan dan bidang sirkulasi terlihat membantu pemustaka dalam mencari informasi atau buku (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Tanggapan ini menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi terlihat mengarahkan pengunjung untuk absen kunjungan, pelayanan dan bidang sirkulasi terlihat membantu pemustaka dalam mencari informasi atau buku.

Sementara tanggapan yang diberikan Anggi Yanto salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Jenis kegiatan pelayanan perpustakaan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat adalah dengan cara selalu ada kunjungan ke sekolah-sekolah, perpustakaan keliling, dan lomba membaca (Wawancara pada pukul 11.00 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Begitu juga dengan informasi di atas yang menjelaskan bahwa jenis kegiatan pelayanan perpustakaan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat adalah dengan cara selalu ada kunjungan ke sekolah-sekolah, perpustakaan keliling, dan lomba membaca. Adanya program kerja yang terus ditambah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat akan memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan minat baca masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan Arliis salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Kegiatan yang dilakukan perpustakaan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat seperti perlombaan serta penghargaan kepada masyarakat yang aktif ataupun masyarakat yang sering berkunjung hal tersebut dilakukan agar minat membaca masyarakat tumbuh (Wawancara pada pukul 11.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kegiatan yang dilakukan perpustakaan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat seperti perlombaan serta penghargaan kepada masyarakat yang aktif ataupun masyarakat yang sering berkunjung hal tersebut dilakukan agar minat membaca masyarakat tumbuh.

Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Pelalawan secara terus menerus melakukan evaluasi untuk terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat dengan menetapkan program-program kerja yang semakin dekat dengan masyarakat seperti mengadakan lomba mendongeng anak, kunjungan sekolah, mobil perpustakaan keliling, dan sebagainya.

3). Meningkatkan Minat Masyarakat ke Perpustakaan

Meningkatkan minat masyarakat ke perpustakaan merupakan salah satu tujuan utama adanya perpustakaan. Melalui perpustakaan masyarakat mampu mendapatkan beragam informasi yang tidak diperoleh melalui media lainnya dan informasi yang diperoleh dari perpustakaan lebih konflik dan otentik, sehingga fungsi perpustakaan sebagai tempat penghimpun beragam informasi yang tertulis dapat diperoleh masyarakat dan akan berdampak pada minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan.

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Minat baca masyarakat pada umumnya masih kurang, saat sekarang ini sudah mulai ada meningkat (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi yang diperoleh dari Tania salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Minat masyarakat untuk datang keperpus kurang apa lagi masa covid-19 (Wawancara pada pukul 13.50 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Dari tanggapan 2 orang pegawai di atas memberikan penjelasan bahwa sebelumnya minat masyarakat untuk datang keperpustakaan sudah cukup baik. Namun semenjak pandemi covid-19 aktivitas perpustakaan yang dikurangi, sehingga berdampak pada minat masyarakat menjadi berkurang untuk datang berkunjung keperpustakaan.

Tanggapan yang disampaikan Wantika Sari salah seorang pengunjung Perpustakaan bahwa:

Minat masyarakat datang keperpustakaan sudah cukup baik. Terutama dari kalangan siswa dan mahasiswa (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Informasi di atas menjelaskan bahwa telah terlihat minat masyarakat datang keperpustakaan. Terutama dari kalangan siswa dan mahasiswa yang memang membutuhkan beragam referensi dalam mendukung aktivitas belajar maupun menambah informasi berupa ilmu pengetahuan yang hanya diperoleh melalui buku-buku bacaan.

Kemudian tanggapan wawancara yang disampaikan T. Ayu Citra Ningsih salah seorang pengunjung perpustakaan yakni:

Masyarakat saat ini belum antusias dalam berkunjung ke perpustakaan dikarenakan Menurut saya belum adanya kegiatan atau gerakan pustakawan dalam Menumbuhkan minat baca dan minat kunjung

pemustaka ke perpustakaan. Saran saya pustakawan harus memiliki program agar dapat menumbuhkan minat kunjung dan minat baca masyarakat (Wawancara pada pukul 14.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa masyarakat saat ini belum antusias dalam berkunjung ke perpustakaan dikarenakan Menurut saya belum adanya kegiatan atau gerakan pustakawan dalam Menumbuhkan minat baca dan minat kunjung pemustaka ke perpustakaan. Saran saya pustakawan harus memiliki program agar dapat menumbuhkan minat kunjung dan minat baca masyarakat.

Sementara tanggapan yang diberikan Anggi Yanto salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Minat masyarakat menurut saya sangat kurang, hanya sebagian siswa atau mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan (Wawancara pada pukul 11.00 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Sedangkan hasil wawancara dengan Arliis salah seorang pengunjung perpustakaan adalah:

Minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan masih kurang terlebih lagi dengan keadaan, saat ini dengan pembatasan PPKM Covid-19 sehingga membuat masyarakat malas untuk ke perpustakaan atau terhambat untuk keluar rumah (Wawancara pada pukul 11.30 Wib, Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan yang disampaikan 2 orang pengunjung di atas memberikan informasi bahwa minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan masih kurang terlebih lagi dengan keadaan, saat ini dengan pembatasan PPKM Covid-19 sehingga membuat masyarakat malas untuk ke perpustakaan atau terhambat untuk keluar rumah.

Dengan demikian jelaslah bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan beberapa sub indikator, maka dapat dikatakan dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pelalawan telah menetapkan sasaran dalam bentuk menyiapkan dan memberikan pelayanan, menambah jumlah kegiatan yang tepat sasaran, dan meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada terutama dikelola oleh pemerintah daerah Pelalawan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa telah ada petugas khusus yang ditempatkan pada perpustakaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengunjung, adanya sarana prasarana yang dipersiapkan dalam menjalankan aktivitas perpustakaan, telah dipersiapkan anggaran untuk pengelolaan perpustakaan. Kemudian setiap tahunnya ditetapkan program kerja dan pelaksanaan program kerja, walaupun dalam 2 periode ini program kerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai harapan dikarenakan dampak dari pandemi covid-19, sehingga program kerja tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat melalui perpustakaan belum berjalan dengan efektif terutama dalam melaksanakan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti perpustakaan keliling dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dapat dikatakan bahwa peran Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah menetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat telah dijalani. Namun pada 2 tahun terakhir menjadi kurang maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran dan adanya pandemi covid-19.

2. Hambatan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat

Penelitian ini selain menganalisis peran juga mencari tahu hambatan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Kabupaten Pelalawan dalam usaha meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat terutama pada perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

a. Kelembagaan

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Kurangnya pemahaman SDM tentang perpustakaan, dan juga anggaran yang terbatas, bangunannya masih pinjam dan kurang memadai. Kemudian adanya rasionalisasi ataupun perubahan anggaran, sehingga tidak sesuai target yang hendak dicapai (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman SDM tentang perpustakaan, dan juga anggaran yang terbatas, bangunannya masih pinjam dan kurang memadai. Kemudian adanya rasionalisasi ataupun perubahan anggaran, sehingga tidak sesuai target yang hendak dicapai

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Hambatan yang dirasakan oleh petugas perpustakaan di dalam meningkatkan minat baca masyarakat yakni gedung yang tidak memadai dan tempat yang tidak terlalu terlihat atau tidak strategis, bergabung dengan kampus (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi di atas menjelaskan bahwa hambatan yang dirasakan oleh petugas perpustakaan di dalam meningkatkan minat baca masyarakat yakni gedung yang tidak memadai dan tempat yang tidak terlalu terlihat atau tidak strategis, bergabung dengan kampus.

Dengan demikian hambatan yang ditemukan dalam kelembagaan yakni kurangnya pemahaman SDM tentang perpustakaan, dan juga anggaran yang terbatas, bangunannya masih pinjam dan kurang memadai. Kemudian adanya rasionalisasi ataupun perubahan anggaran, sehingga tidak sesuai target yang hendak dicapai.

b. Kebijakan

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Program kerja yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan tidak sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang ditetapkan, misalnya ada rasionalisasi, tentu anggarannya dikurangi sementara target sudah ditentukan dari awal, sehingga tidak tercapainya target yang diinginkan (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Informasi yang diperoleh dari tanggapan di atas bahwa program kerja yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan Kepustakaan tidak sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang ditetapkan, misalnya ada rasionalisasi, tentu anggarannya dikurangi sementara target sudah ditentukan dari awal, sehingga tidak tercapainya target yang diinginkan

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Hambatan dari program kerja perpustakaan yakni ada rasionalisasi, kegiatan yang dihapus dan ada juga yang di kurangi karena adanya pandemi Covid-19 (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Telah ada kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Tetapi berbagai program tidak bisa dilaksanakan dengan semestinya karena adanya rasionalisasi anggaran.

c. Sasaran

Hasil wawancara yang diperoleh dari Hijra Mardhra selaku Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

Menyediakan perpustakaan keliling serta dengan program kerja yang telah dibuat (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Wawancara dengan Nelti Roza selaku Pustakawan atau petugas perpustakaan yakni:

Upaya apa yang dilakukan petugas perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan dengan cara menambahkan bahan bacaan, memberikan fasilitas yang nyaman dan bersih, free WIFI (Wawancara pada pukul 13.45 Wib, Hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021 berlokasi di Perpustakaan)

Hambatan yang ditemukan dalam mencapai sasaran meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat adalah kurangnya bahan bacaan yang terdapat pada perpustakaan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan telah berperan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Hasil ini diperoleh dari temuan penelitian yang ditetapkan pada indikator kelembagaan, kebijakan, dan sasaran.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemukan dalam usaha meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat yakni bangunan yang belum permanen (bangunan khusus), anggaran yang tidak terpenuhi, koleksi yang belum lengkap.

B. Saran

Adapun saran yang hendak peneliti sampaikan pada penelitian ini, yakni:

1. Hendaknya pemerintah daerah menetapkan perpustakaan sebagai skala prioritas untuk dikembangkan. Hal ini untuk mendukung program kerja bupati yang salah satunya adalah Pelalawan Terang.
2. Hendaknya Dinas Kearsipan dan Kepustakaan mengusulkan dan mengajukan pembangunan gedung perpustakaan yang representatif, sehingga mampu memberikan pelayanan perpustakaan dan menjadi perpustakaan rujukan bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

3. Hendaknya Dinas Kearsipan dan Kepustakaan mengembangkan inovasi perpustakaan seperti membuat perpustakaan digital yang lebih mudah dalam menjangkau masyarakat dan perpustakaan digital yang bisa diakses melalui aplikasi yang bisa ditangkap oleh perangkat komputer maupun handphone.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Novel. 2005. *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-pokok Organisasi Moderns*. Jakarta: Bina Ilmu
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah, "Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Komaruddin. 2007. *Encyclopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone,

- Rivai, Viethzal, 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Djambatan.
- Sari, Dian Cita. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno, NS. 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana, 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Refika Cipta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Wasistiono, Sadu. 2005. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. Fokus Media.
- Wasistiono, Sadu. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqa Print.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal/Skripsi/Tesis

Astuti, Puspita Dwi (2015) Peran Perpustakaan Dan Arsip Dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat Di Perpustakaan Umum Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. .3 No. (2), 2015

Oktariyani (2020) Upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Dalam Meningkatkan Minat Baca Di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. (1): 2020

Wisudayanti, Adinda Nella (2012) Peran Perpustakaan Daerah dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat (Studi pada Perpustakaan Umum Taman Ekspresi Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 01 No (1) 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan